



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222 /PMK.07/2010

TENTANG

ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) bagian daerah.
- (2) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
 - b. 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 2010.
- (2) Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf (a) merupakan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 6,5% (enam koma lima persen) yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota adalah sebesar Rp1.832.054.198,866,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - b. Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp986.490.722.417,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Alokasi Definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan di tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan pada tahap III di bulan November tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 610

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222 /PMK.07/2010 TENTANG
ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH
PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

dalam rupiah

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam			
1	Kab. Aceh Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Aceh Besar	3.693.657.659	2.362.308.798	6.055.966.457
3	Kab. Aceh Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Aceh Singkil	3.693.657.659	2.245.837.043	5.939.494.702
5	Kab. Aceh Tengah	3.693.657.659	2.400.377.318	6.094.034.977
6	Kab. Aceh Tenggara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Aceh Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Aceh Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kab. Bireun	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Pidie	3.693.657.659	2.238.061.884	5.931.719.543
11	Kab. Simeulue	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kota Banda Aceh	3.693.657.659	2.161.683.893	5.855.341.552
13	Kota Sabang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
14	Kota Langsa	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kota Lhokseumawe	3.693.657.659	-	3.693.657.659
16	Kab. Nagan Raya	3.693.657.659	2.565.839.566	6.259.497.225
17	Kab. Aceh Jaya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.693.657.659	2.065.838.376	5.759.496.035
19	Kab. Gayo Lues	3.693.657.659	2.729.338.060	6.422.995.719
20	Kab. Aceh Tamiang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
21	Kab. Bener Meriah	3.693.657.659	2.508.972.196	6.202.629.855
22	Kab. Pidie Jaya	3.693.657.659	2.834.379.493	6.528.037.152
23	Kota Subulussalam	3.693.657.659	-	3.693.657.659
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	Kab. Asahan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Dairi	3.693.657.659	2.196.224.692	5.889.882.351
3	Kab. Deli Serdang	3.693.657.659	5.696.389.484	9.390.047.143
4	Kab. Tanah Karo	3.693.657.659	2.727.009.023	6.420.666.682
5	Kab. Labuhan Batu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Langkat	3.693.657.659	3.728.353.502	7.422.011.161
7	Kab. Mandailing Natal	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Nias	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kab. Simalungun	3.693.657.659	2.567.445.265	6.261.102.924
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.693.657.659	3.271.177.985	6.964.835.644
11	Kab. Tapanuli Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Tapanuli Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Toba Samosir	3.693.657.659	2.226.802.645	5.920.460.304



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
14	Kota Binjai	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kota Medan	3.693.657.659	7.135.325.235	10.828.982.894
16	Kota Pematang Siantar	3.693.657.659	-	3.693.657.659
17	Kota Sibolga	3.693.657.659	-	3.693.657.659
18	Kota Tanjung Balai	3.693.657.659	-	3.693.657.659
19	Kota Tebing Tinggi	3.693.657.659	2.224.213.320	5.917.870.979
20	Kota Padang Sidempuan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
21	Kab. Pakpak Bharat	3.693.657.659	2.037.816.333	5.731.473.992
22	Kab. Nias Selatan	3.693.657.659	2.855.100.297	6.548.757.956
23	Kab. Humbang Hasundutan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
24	Kab. Serdang Bedagai	3.693.657.659	2.176.894.568	5.870.552.227
25	Kab. Samosir	3.693.657.659	-	3.693.657.659
26	Kab. Batubara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
27	Kab. Padang Lawas Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
28	Kab. Padang Lawas	3.693.657.659	-	3.693.657.659
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	3.693.657.659	2.048.215.293	5.741.872.952
30	Kab. Labuhan Batu Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
31	Kab. Nias Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
32	Kab. Nias Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
33	Kota Gunungsitoli	3.693.657.659	-	3.693.657.659
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	Kab. Limapuluh Kota	3.693.657.659	2.647.784.320	6.341.441.979
2	Kab. Agam	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.693.657.659	2.795.599.131	6.489.256.790
4	Kab. Padang Pariaman	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Pasaman	3.693.657.659	2.980.359.920	6.674.017.579
6	Kab. Pesisir Selatan	3.693.657.659	2.217.899.393	5.911.557.052
7	Kab. Sijunjung	3.693.657.659	2.677.944.911	6.371.602.570
8	Kab. Solok	3.693.657.659	3.095.735.517	6.789.393.176
9	Kab. Tanah Datar	3.693.657.659	2.311.676.463	6.005.334.122
10	Kota Bukit Tinggi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kota Padang Panjang	3.693.657.659	2.594.616.239	6.288.273.898
12	Kota Padang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kota Payakumbuh	3.693.657.659	1.948.624.018	5.642.281.677
14	Kota Sawahlunto	3.693.657.659	1.876.731.236	5.570.388.895
15	Kota Solok	3.693.657.659	1.753.020.506	5.446.678.165
16	Kota Pariaman	3.693.657.659	1.650.497.182	5.344.154.841
17	Kab. Pasaman Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
18	Kab. Dharmasraya	3.693.657.659	2.010.809.200	5.704.466.859
19	Kab. Solok Selatan	3.693.657.659	2.344.587.079	6.038.244.738
IV	Provinsi Riau			
1	Kab. Bengkalis	3.693.657.659	-	3.693.657.659



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
2	Kab. Indragiri Hilir	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Indragiri Hulu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Kampar	3.693.657.659	3.838.151.706	7.531.809.365
5	Kab. Kuantan Singingi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Pelalawan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Rokan Hilir	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Rokan Hulu	3.693.657.659	3.234.363.411	6.928.021.070
9	Kab. Siak	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kota Dumai	3.693.657.659	2.409.520.754	6.103.178.413
11	Kota Pekanbaru	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Kepulauan Meranti	3.693.657.659	-	3.693.657.659
V	Provinsi Kepulauan Riau			
1	Kab. Bintan	3.693.657.659	3.479.166.673	7.172.824.332
2	Kab. Natuna	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Karimun	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kota Batam	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kota Tanjung Pinang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Lingga	3.693.657.659	2.458.404.820	6.152.062.479
7	Kab. Kepulauan Anambas	3.693.657.659	-	3.693.657.659
VI	Provinsi Jambi			
1	Kab. Batanghari	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Bungo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Kerinci	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Merangin	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Muaro Jambi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Sarolangun	3.693.657.659	3.149.095.404	6.842.753.063
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.693.657.659	3.035.840.918	6.729.498.577
9	Kab. Tebo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kota Jambi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kota Sungai Penuh	3.693.657.659	-	3.693.657.659
VII	Provinsi Sumatera Selatan			
1	Kab. Lahat	3.693.657.659	2.626.655.342	6.320.313.001
2	Kab. Musi Banyuasin	3.693.657.659	4.364.806.937	8.058.464.596
3	Kab. Musi Rawas	3.693.657.659	3.239.815.053	6.933.472.712
4	Kab. Muara Enim	3.693.657.659	4.066.866.285	7.760.523.944
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.693.657.659	2.677.348.367	6.371.006.026
7	Kota Palembang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kota Pagar Alam	3.693.657.659	2.621.447.837	6.315.105.496
9	Kota Lubuk Linggau	3.693.657.659	3.232.759.630	6.926.417.289
10	Kota Prabumulih	3.693.657.659	2.660.521.842	6.354.179.501



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
11	Kab. Banyuasin	3.693.657.659	4.139.398.306	7.833.055.965
12	Kab. Ogan Ilir	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.693.657.659	3.281.727.616	6.975.385.275
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.693.657.659	2.559.885.298	6.253.542.957
15	Kab. Empat Lawang	3.693.657.659	2.460.104.074	6.153.761.733
VIII	Provinsi Bangka Belitung			
1	Kab. Bangka	3.693.657.659	2.543.399.953	6.237.057.612
2	Kab. Belitung	3.693.657.659	2.846.420.664	6.540.078.323
3	Kota Pangkal Pinang	3.693.657.659	3.445.213.999	7.138.871.658
4	Kab. Bangka Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Bangka Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Bangka Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Belitung Timur	3.693.657.659	2.275.567.653	5.969.225.312
IX	Provinsi Bengkulu			
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Bengkulu Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Rejang Lebong	3.693.657.659	2.153.102.585	5.846.760.244
4	Kota Bengkulu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Kaur	3.693.657.659	2.429.515.381	6.123.173.040
6	Kab. Seluma	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Mukomuko	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Lebong	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kab. Kepahiang	3.693.657.659	2.706.758.076	6.400.415.735
10	Kab. Bengkulu Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
X	Provinsi Lampung			
1	Kab. Lampung Barat	3.693.657.659	3.396.075.079	7.089.732.738
2	Kab. Lampung Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Lampung Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Lampung Utara	3.693.657.659	2.834.118.942	6.527.776.601
5	Kab. Lampung Timur	3.693.657.659	2.975.015.261	6.668.672.920
6	Kab. Tanggamus	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Tulang Bawang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Way Kanan	3.693.657.659	3.399.138.007	7.092.795.666
9	Kota Bandar Lampung	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kota Metro	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kab. Pesawaran	3.693.657.659	2.284.914.437	5.978.572.096
12	Kab. Pringsewu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Mesuji	3.693.657.659	-	3.693.657.659
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XI	Provinsi DKI Jakarta	18.468.288.297	64.171.821.545	82.640.109.842
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	Kab. Bandung	3.693.657.659	-	3.693.657.659



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
2	Kab. Bekasi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Bogor	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Ciamis	3.693.657.659	3.226.137.839	6.919.795.498
5	Kab. Cianjur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Cirebon	3.693.657.659	3.951.296.792	7.644.954.451
7	Kab. Garut	3.693.657.659	3.809.984.732	7.503.642.391
8	Kab. Indramayu	3.693.657.659	4.200.926.024	7.894.583.683
9	Kab. Karawang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Kuningan	3.693.657.659	3.507.428.326	7.201.085.985
11	Kab. Majalengka	3.693.657.659	3.603.973.763	7.297.631.422
12	Kab. Purwakarta	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Subang	3.693.657.659	4.959.829.374	8.653.487.033
14	Kab. Sukabumi	3.693.657.659	4.310.595.665	8.004.253.324
15	Kab. Sumedang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
16	Kab. Tasikmalaya	3.693.657.659	4.592.797.561	8.286.455.220
17	Kota Bandung	3.693.657.659	-	3.693.657.659
18	Kota Bekasi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
19	Kota Bogor	3.693.657.659	-	3.693.657.659
20	Kota Cirebon	3.693.657.659	-	3.693.657.659
21	Kota Depok	3.693.657.659	-	3.693.657.659
22	Kota Sukabumi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
23	Kota Cimahi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
24	Kota Tasikmalaya	3.693.657.659	2.759.855.998	6.453.513.657
25	Kota Banjar	3.693.657.659	2.026.315.048	5.719.972.707
26	Kab. Bandung Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XIII	Provinsi Banten			
1	Kab. Lebak	3.693.657.659	4.314.092.759	8.007.750.418
2	Kab. Pandeglang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Serang	3.693.657.659	3.602.503.884	7.296.161.543
4	Kab. Tangerang	3.693.657.659	13.512.601.774	17.206.259.433
5	Kota Cilegon	3.693.657.659	7.305.132.464	10.998.790.123
6	Kota Tangerang	3.693.657.659	7.483.149.644	11.176.807.303
7	Kota Serang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kota Tangerang Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XIV	Provinsi Jawa Tengah			
1	Kab. Banjarnegara	3.693.657.659	4.362.137.957	8.055.795.616
2	Kab. Banyumas	3.693.657.659	5.866.684.900	9.560.342.559
3	Kab. Batang	3.693.657.659	4.407.203.871	8.100.861.530
4	Kab. Blora	3.693.657.659	3.824.204.745	7.517.862.404
5	Kab. Boyolali	3.693.657.659	3.233.587.179	6.927.244.838
6	Kab. Brebes	3.693.657.659	5.312.324.906	9.005.982.565
7	Kab. Cilacap	3.693.657.659	5.581.360.299	9.275.017.958



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
8	Kab. Demak	3.693.657.659	3.701.447.481	7.395.105.140
9	Kab. Grobogan	3.693.657.659	4.614.239.494	8.307.897.153
10	Kab. Jepara	3.693.657.659	3.558.471.928	7.252.129.587
11	Kab. Karanganyar	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Kebumen	3.693.657.659	3.830.423.472	7.524.081.131
13	Kab. Kendal	3.693.657.659	3.103.774.031	6.797.431.690
14	Kab. Klaten	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kab. Kudus	3.693.657.659	2.804.006.135	6.497.663.794
16	Kab. Magelang	3.693.657.659	3.477.984.392	7.171.642.051
17	Kab. Pati	3.693.657.659	4.026.619.984	7.720.277.643
18	Kab. Pekalongan	3.693.657.659	2.714.990.396	6.408.648.055
19	Kab. Pemasang	3.693.657.659	3.472.989.240	7.166.646.899
20	Kab. Purbalingga	3.693.657.659	4.393.398.950	8.087.056.609
21	Kab. Purworejo	3.693.657.659	4.167.422.745	7.861.080.404
22	Kab. Rembang	3.693.657.659	3.746.509.764	7.440.167.423
23	Kab. Semarang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
24	Kab. Sragen	3.693.657.659	2.762.878.013	6.456.535.672
25	Kab. Sukoharjo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
26	Kab. Tegal	3.693.657.659	-	3.693.657.659
27	Kab. Temanggung	3.693.657.659	4.101.272.690	7.794.930.349
28	Kab. Wonogiri	3.693.657.659	4.111.237.631	7.804.895.290
29	Kab. Wonosobo	3.693.657.659	3.690.011.460	7.383.669.119
30	Kota Magelang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
31	Kota Pekalongan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
32	Kota Salatiga	3.693.657.659	-	3.693.657.659
33	Kota Semarang	3.693.657.659	5.743.003.101	9.436.660.760
34	Kota Surakarta	3.693.657.659	-	3.693.657.659
35	Kota Tegal	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XV	Provinsi DI Yogyakarta			
1	Kab. Bantul	3.693.657.659	3.770.609.791	7.464.267.450
2	Kab. Gunung Kidul	3.693.657.659	4.278.498.341	7.972.156.000
3	Kab. Kulon Progo	3.693.657.659	3.553.030.851	7.246.688.510
4	Kab. Sleman	3.693.657.659	3.965.732.587	7.659.390.246
5	Kota Yogyakarta	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XVI	Provinsi Jawa Timur			
1	Kab. Bangkalan	3.693.657.659	2.633.059.705	6.326.717.364
2	Kab. Banyuwangi	3.693.657.659	4.289.829.666	7.983.487.325
3	Kab. Blitar	3.693.657.659	4.131.512.574	7.825.170.233
4	Kab. Bojonegoro	3.693.657.659	3.667.306.999	7.360.964.658
5	Kab. Bondowoso	3.693.657.659	3.245.723.816	6.939.381.475
6	Kab. Gresik	3.693.657.659	4.103.924.687	7.797.582.346
7	Kab. Jember	3.693.657.659	-	3.693.657.659



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
8	Kab. Jombang	3.693.657.659	4.493.275.148	8.186.932.807
9	Kab. Kediri	3.693.657.659	5.847.752.693	9.541.410.352
10	Kab. Lamongan	3.693.657.659	4.391.867.188	8.085.524.847
11	Kab. Lumajang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Madiun	3.693.657.659	3.877.941.456	7.571.599.115
13	Kab. Magetan	3.693.657.659	3.553.129.049	7.246.786.708
14	Kab. Malang	3.693.657.659	7.132.828.345	10.826.486.004
15	Kab. Mojokerto	3.693.657.659	3.617.672.730	7.311.330.389
16	Kab. Nganjuk	3.693.657.659	4.107.792.856	7.801.450.515
17	Kab. Ngawi	3.693.657.659	3.101.080.420	6.794.738.079
18	Kab. Pacitan	3.693.657.659	3.629.822.150	7.323.479.809
19	Kab. Pamekasan	3.693.657.659	2.514.832.596	6.208.490.255
20	Kab. Pasuruan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
21	Kab. Ponorogo	3.693.657.659	4.530.622.479	8.224.280.138
22	Kab. Probolinggo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
23	Kab. Sampang	3.693.657.659	3.629.668.948	7.323.326.607
24	Kab. Sidoarjo	3.693.657.659	5.338.033.527	9.031.691.186
25	Kab. Situbondo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
26	Kab. Sumenep	3.693.657.659	2.910.799.855	6.604.457.514
27	Kab. Trenggalek	3.693.657.659	4.163.400.161	7.857.057.820
28	Kab. Tuban	3.693.657.659	4.050.132.126	7.743.789.785
29	Kab. Tulungagung	3.693.657.659	5.144.599.713	8.838.257.372
30	Kota Blitar	3.693.657.659	3.097.764.153	6.791.421.812
31	Kota Kediri	3.693.657.659	-	3.693.657.659
32	Kota Madiun	3.693.657.659	2.299.005.597	5.992.663.256
33	Kota Malang	3.693.657.659	3.061.204.939	6.754.862.598
34	Kota Mojokerto	3.693.657.659	2.874.278.620	6.567.936.279
35	Kota Pasuruan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
36	Kota Probolinggo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
37	Kota Surabaya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
38	Kota Batu	3.693.657.659	2.049.671.219	5.743.328.878
XVII	Provinsi Kalimantan Barat			
1	Kab. Bengkayang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Landak	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Kapuas Hulu	3.693.657.659	4.548.411.392	8.242.069.051
4	Kab. Ketapang	3.693.657.659	4.074.934.897	7.768.592.556
5	Kab. Pontianak	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Sambas	3.693.657.659	3.347.103.497	7.040.761.156
7	Kab. Sanggau	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Sintang	3.693.657.659	4.080.571.279	7.774.228.938
9	Kota Pontianak	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kota Singkawang	3.693.657.659	-	3.693.657.659



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
11	Kab. Sekadau	3.693.657.659	2.520.848.020	6.214.505.679
12	Kab. Melawi	3.693.657.659	2.479.068.443	6.172.726.102
13	Kab. Kayong Utara	3.693.657.659	2.516.858.352	6.210.516.011
14	Kab. Kubu Raya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	Kab. Barito Selatan	3.693.657.659	3.170.704.648	6.864.362.307
2	Kab. Barito Utara	3.693.657.659	2.646.468.174	6.340.125.833
3	Kab. Kapuas	3.693.657.659	3.607.061.134	7.300.718.793
4	Kab. Kotawaringin Barat	3.693.657.659	2.861.680.672	6.555.338.331
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kota Palangkaraya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Barito Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Murung Raya	3.693.657.659	4.064.200.667	7.757.858.326
9	Kab. Pulang Pisau	3.693.657.659	3.013.002.259	6.706.659.918
10	Kab. Gunung Mas	3.693.657.659	2.919.040.007	6.612.697.666
11	Kab. Lamandau	3.693.657.659	2.888.680.250	6.582.337.909
12	Kab. Sukamara	3.693.657.659	2.833.840.378	6.527.498.037
13	Kab. Katingan	3.693.657.659	3.756.149.783	7.449.807.442
14	Kab. Seruyan	3.693.657.659	2.808.836.925	6.502.494.584
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	Kab. Banjar	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Barito Kuala	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3.693.657.659	2.715.097.815	6.408.755.474
6	Kab. Kotabaru	3.693.657.659	3.748.713.450	7.442.371.109
7	Kab. Tabalong	3.693.657.659	2.780.405.450	6.474.063.109
8	Kab. Tanah Laut	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kab. Tapin	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kota Banjarbaru	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kota Banjarmasin	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Balangan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Tanah Bumbu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XX	Provinsi Kalimantan Timur			
1	Kab. Berau	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Bulungan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Kutai Kartanegara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Kutai Barat	3.693.657.659	4.947.851.042	8.641.508.701
5	Kab. Kutai Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Malinau	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Nunukan	3.693.657.659	3.049.874.003	6.743.531.662
8	Kab. Pasir	3.693.657.659	-	3.693.657.659



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
9	Kota Balikpapan	3.693.657.659	4.720.236.863	8.413.894.522
10	Kota Bontang	3.693.657.659	2.195.164.613	5.888.822.272
11	Kota Samarinda	3.693.657.659	2.457.508.606	6.151.166.265
12	Kota Tarakan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
13	Kab. Penajam Paser Utara	3.693.657.659	-	3.693.657.659
14	Kab. Tana Tidung	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXI	Provinsi Sulawesi Utara			
1	Kab. Bolaang Mongondow	3.693.657.659	2.640.986.419	6.334.644.078
2	Kab. Minahasa	3.693.657.659	2.241.307.180	5.934.964.839
3	Kab. Sangihe	3.693.657.659	2.136.399.252	5.830.056.911
4	Kota Bitung	3.693.657.659	2.412.103.824	6.105.761.483
5	Kota Manado	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Kepulauan Talaud	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Minahasa Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kota Tomohon	3.693.657.659	2.739.416.981	6.433.074.640
9	Kab. Minahasa Utara	3.693.657.659	2.171.536.602	5.865.194.261
10	Kota Kotamobagu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.693.657.659	2.767.849.128	6.461.506.787
12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3.693.657.659	2.644.864.905	6.338.522.564
13	Kab. Minahasa Tenggara	3.693.657.659	2.917.997.287	6.611.654.946
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXII	Provinsi Gorontalo			
1	Kab. Boalemo	3.693.657.659	2.990.836.399	6.684.494.058
2	Kab. Gorontalo	3.693.657.659	3.306.058.085	6.999.715.744
3	Kota Gorontalo	3.693.657.659	1.964.302.413	5.657.960.072
4	Kab. Pohuwato	3.693.657.659	2.966.643.552	6.660.301.211
5	Kab. Bone Bolango	3.693.657.659	2.841.377.984	6.535.035.643
6	Kab. Gorontalo Utara	3.693.657.659	2.660.313.821	6.353.971.480
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Kab. Banggai	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Banggai Kepulauan	3.693.657.659	2.376.936.215	6.070.593.874
3	Kab. Buol	3.693.657.659	3.033.421.155	6.727.078.814
4	Kab. Toli-Toli	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Donggala	3.693.657.659	2.459.616.474	6.153.274.133
6	Kab. Morowali	3.693.657.659	3.100.427.931	6.794.085.590
7	Kab. Poso	3.693.657.659	3.327.919.524	7.021.577.183
8	Kota Palu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kab. Parigi Moutong	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Tojo Una Una	3.693.657.659	2.990.623.861	6.684.281.520
11	Kab. Sigi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
1	Kab. Bantaeng	3.693.657.659	1.917.340.238	5.610.997.897
2	Kab. Barru	3.693.657.659	2.490.910.921	6.184.568.580
3	Kab. Bone	3.693.657.659	4.445.784.723	8.139.442.382
4	Kab. Bulukumba	3.693.657.659	2.890.732.129	6.584.389.788
5	Kab. Enrekang	3.693.657.659	3.052.582.703	6.746.240.362
6	Kab. Gowa	3.693.657.659	3.226.804.963	6.920.462.622
7	Kab. Jeneponto	3.693.657.659	2.345.948.801	6.039.606.460
8	Kab. Luwu	3.693.657.659	3.314.190.336	7.007.847.995
9	Kab. Luwu Utara	3.693.657.659	3.554.497.246	7.248.154.905
10	Kab. Maros	3.693.657.659	3.259.661.762	6.953.319.421
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.693.657.659	2.184.703.701	5.878.361.360
12	Kab. Pinrang	3.693.657.659	2.295.077.522	5.988.735.181
13	Kab. Kepulauan Selayar	3.693.657.659	2.306.583.580	6.000.241.239
14	Kab. Sidenreng Rappang	3.693.657.659	3.314.911.362	7.008.569.021
15	Kab. Sinjai	3.693.657.659	2.426.297.753	6.119.955.412
16	Kab. Soppeng	3.693.657.659	3.146.787.171	6.840.444.830
17	Kab. Takalar	3.693.657.659	3.014.357.807	6.708.015.466
18	Kab. Tana Toraja	3.693.657.659	2.940.715.786	6.634.373.445
19	Kab. Wajo	3.693.657.659	3.542.346.121	7.236.003.780
20	Kota Pare-pare	3.693.657.659	2.792.831.210	6.486.488.869
21	Kota Makassar	3.693.657.659	4.574.592.941	8.268.250.600
22	Kota Palopo	3.693.657.659	2.011.158.114	5.704.815.773
23	Kab. Luwu Timur	3.693.657.659	3.853.971.753	7.547.629.412
24	Kab. Toraja Utara	3.693.657.659	2.380.218.100	6.073.875.759
XXV	Provinsi Sulawesi Barat			
1	Kab. Majene	3.693.657.659	2.550.561.700	6.244.219.359
2	Kab. Mamuju	3.693.657.659	3.417.296.156	7.110.953.815
3	Kab. Polewali Mandar	3.693.657.659	2.466.482.933	6.160.140.592
4	Kab. Mamasa	3.693.657.659	2.897.570.950	6.591.228.609
5	Kab. Mamuju Utara	3.693.657.659	2.718.528.877	6.412.186.536
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	Kab. Buton	3.693.657.659	2.503.298.685	6.196.956.344
2	Kab. Konawe	3.693.657.659	2.744.162.831	6.437.820.490
3	Kab. Kolaka	3.693.657.659	2.549.687.922	6.243.345.581
4	Kab. Muna	3.693.657.659	3.369.975.636	7.063.633.295
5	Kota Kendari	3.693.657.659	2.012.964.014	5.706.621.673
6	Kota Bau-bau	3.693.657.659	1.900.656.387	5.594.314.046
7	Kab. Konawe Selatan	3.693.657.659	2.593.537.270	6.287.194.929
8	Kab. Bombana	3.693.657.659	2.793.578.296	6.487.235.955
9	Kab. Wakatobi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Kolaka Utara	3.693.657.659	3.022.181.026	6.715.838.685
11	Kab. Konawe Utara	3.693.657.659	3.049.880.543	6.743.538.202



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
12	Kab. Buton Utara	3.693.657.659	2.780.239.962	6.473.897.621
XXVII	Provinsi Bali			
1	Kab. Badung	3.693.657.659	7.185.762.895	10.879.420.554
2	Kab. Bangli	3.693.657.659	2.314.598.310	6.008.255.969
3	Kab. Buleleng	3.693.657.659	3.791.146.141	7.484.803.800
4	Kab. Gianyar	3.693.657.659	2.231.421.632	5.925.079.291
5	Kab. Jembrana	3.693.657.659	2.442.245.628	6.135.903.287
6	Kab. Karangasem	3.693.657.659	3.027.132.361	6.720.790.020
7	Kab. Klungkung	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Tabanan	3.693.657.659	2.973.957.959	6.667.615.618
9	Kota Denpasar	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	Kab. Bima	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Dompu	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Lombok Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Lombok Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Lombok Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Sumbawa	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kota Mataram	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kota Bima	3.693.657.659	2.764.457.938	6.458.115.597
9	Kab. Sumbawa Barat	3.693.657.659	2.256.724.639	5.950.382.298
10	Kab. Lombok Utara	3.693.657.659	2.253.071.987	5.946.729.646
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	Kab. Alor	3.693.657.659	2.349.456.046	6.043.113.705
2	Kab. Belu	3.693.657.659	3.089.143.968	6.782.801.627
3	Kab. Ende	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Flores Timur	3.693.657.659	2.822.895.227	6.516.552.886
5	Kab. Kupang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Lembata	3.693.657.659	2.577.788.118	6.271.445.777
7	Kab. Manggarai	3.693.657.659	3.291.115.767	6.984.773.426
8	Kab. Ngada	3.693.657.659	2.307.470.695	6.001.128.354
9	Kab. Sikka	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Sumba Barat	3.693.657.659	2.405.683.684	6.099.341.343
11	Kab. Sumba Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.693.657.659	2.640.662.375	6.334.320.034
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.693.657.659	2.708.027.696	6.401.685.355
14	Kota Kupang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kab. Rote Ndao	3.693.657.659	3.143.568.057	6.837.225.716
16	Kab. Manggarai Barat	3.693.657.659	3.007.780.716	6.701.438.375
17	Kab. Nagekeo	3.693.657.659	2.153.250.716	5.846.908.375
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.693.657.659	2.429.978.787	6.123.636.446
19	Kab. Sumba Tengah	3.693.657.659	2.568.001.433	6.261.659.092



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
20	Kab. Manggarai Timur	3.693.657.659	2.640.331.725	6.333.989.384
21	Kab. Sabu Raijua	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXX	Provinsi Maluku			
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.693.657.659	2.789.376.044	6.483.033.703
2	Kab. Maluku Tengah	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Maluku Tenggara	3.693.657.659	2.235.170.367	5.928.828.026
4	Kab. Pulau Buru	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kota Ambon	3.693.657.659	1.939.596.061	5.633.253.720
6	Kab. Seram Bagian Barat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Seram Bagian Timur	3.693.657.659	-	3.693.657.659
8	Kab. Kepulauan Aru	3.693.657.659	-	3.693.657.659
9	Kota Tual	3.693.657.659	2.576.569.949	6.270.227.608
10	Kab. Maluku Barat Daya	3.693.657.659	2.956.371.026	6.650.028.685
11	Kab. Buru Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXXI	Provinsi Maluku Utara			
1	Kab. Halmahera Tengah	3.693.657.659	2.245.419.880	5.939.077.539
2	Kab. Halmahera Barat	3.693.657.659	1.960.701.547	5.654.359.206
3	Kota Ternate	3.693.657.659	2.039.600.785	5.733.258.444
4	Kab. Halmahera Timur	3.693.657.659	2.493.020.408	6.186.678.067
5	Kota Tidore Kepulauan	3.693.657.659	2.700.207.874	6.393.865.533
6	Kab. Kepulauan Sula	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Halmahera Selatan	3.693.657.659	3.326.244.444	7.019.902.103
8	Kab. Halmahera Utara	3.693.657.659	2.202.256.461	5.895.914.120
9	Kab. Pulau Morotai	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXXII	Provinsi Papua			
1	Kab. Biak Numfor	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Jayapura	3.693.657.659	-	3.693.657.659
3	Kab. Jayawijaya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kab. Merauke	3.693.657.659	-	3.693.657.659
5	Kab. Mimika	3.693.657.659	4.366.591.510	8.060.249.169
6	Kab. Nabire	3.693.657.659	3.580.610.091	7.274.267.750
7	Kab. Paniai	3.693.657.659	3.368.261.243	7.061.918.902
8	Kab. Puncak Jaya	3.693.657.659	3.441.770.816	7.135.428.475
9	Kab. Kepulauan Yapen	3.693.657.659	2.985.046.990	6.678.704.649
10	Kota Jayapura	3.693.657.659	2.804.748.613	6.498.406.272
11	Kab. Sarmi	3.693.657.659	-	3.693.657.659
12	Kab. Keerom	3.693.657.659	2.421.188.707	6.114.846.366
13	Kab. Yahukimo	3.693.657.659	3.300.107.050	6.993.764.709
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.693.657.659	-	3.693.657.659
15	Kab. Tolikara	3.693.657.659	3.471.067.943	7.164.725.602
16	Kab. Boven Digoel	3.693.657.659	-	3.693.657.659
17	Kab. Mappi	3.693.657.659	3.652.055.324	7.345.712.983



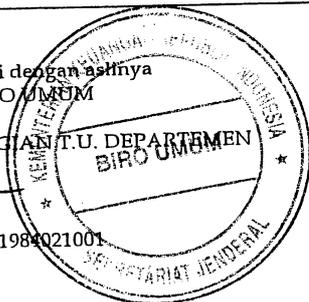
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB Bagi Rata	Insentif PBB	Jumlah
18	Kab. Asmat	3.693.657.659	4.887.357.894	8.581.015.553
19	Kab. Waropen	3.693.657.659	3.117.804.265	6.811.461.924
20	Kab. Supiori	3.693.657.659	2.379.144.218	6.072.801.877
21	Kab. Mamberamo Raya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
22	Kab. Mamberamo Tengah	3.693.657.659	3.121.755.252	6.815.412.911
23	Kab. Yalimo	3.693.657.659	-	3.693.657.659
24	Kab. Lanny Jaya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
25	Kab. Nduga	3.693.657.659	-	3.693.657.659
26	Kab. Puncak	3.693.657.659	3.478.299.663	7.171.957.322
27	Kab. Dogiyai	3.693.657.659	3.260.014.423	6.953.672.082
28	Kab. Intan Jaya	3.693.657.659	-	3.693.657.659
29	Kab. Deiyai	3.693.657.659	-	3.693.657.659
XXXIII	Provinsi Papua Barat			
1	Kab. Sorong	3.693.657.659	-	3.693.657.659
2	Kab. Manokwari	3.693.657.659	4.301.571.339	7.995.228.998
3	Kab. Fak Fak	3.693.657.659	-	3.693.657.659
4	Kota Sorong	3.693.657.659	3.281.799.566	6.975.457.225
5	Kab. Sorong Selatan	3.693.657.659	-	3.693.657.659
6	Kab. Raja Ampat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
7	Kab. Teluk Bintuni	3.693.657.659	5.003.918.212	8.697.575.871
8	Kab. Teluk Wondama	3.693.657.659	3.592.895.775	7.286.553.434
9	Kab. Kaimana	3.693.657.659	-	3.693.657.659
10	Kab. Tambrauw	3.693.657.659	-	3.693.657.659
11	Kab. Maybrat	3.693.657.659	-	3.693.657.659
	Total	1.832.054.198.866	986.490.722.417	2.818.544.921.283

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAKOSURTABAL T.U. DEPARTEMEN
BIRO UMUM

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO